

**DAFTAR ISIAN**  
**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: NANJUNG  
Kecamatan: MARGAASIH  
Kabupaten: KABUPATEN BANDUNG  
Provinsi: JAWA BARAT  
Bulan: 1  
Tahun: 2021

Nama Pengisi: DENI RUSDIANA  
Pekerjaan: PERANGKAT DESA  
Jabatan: KASI PEMERINTAHAN  
Kepala Desa / Lurah: DIAN IRAWAN,SE  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN  
Referensi 1 : RT  
Referensi 2: PKK  
Referensi 3: PLKB  
Referensi 4:

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

| <b>A. Jumlah Penduduk</b>  |               |            |
|----------------------------|---------------|------------|
| Jumlah                     | Jenis Kelamin |            |
|                            | Laki-laki     | Perempuan  |
| Jumlah penduduk tahun ini  | 8244 orang    | 7941 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 8295 orang    | 7994 orang |
| Persentase perkembangan    | -0.61 %       | -0.66 %    |

| <b>B. Jumlah Keluarga</b>         |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah                            | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini  | 5900 KK      | 75 KK        | 5975 KK      |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 5890 KK      | 75 KK        | 5965 KK      |
| Prosentase Perkembangan           | 0.17 %       | 0 %          |              |

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

| <b>A. Pengangguran</b>   |            |
|--|------------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)                     | 9188 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 2199 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga        | 75 orang   |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh                   | 6004 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu             | 1000 orang |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja         | 5 orang    |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja               | 0 orang    |

| <b>B. Kesejahteraan Keluarga</b>    |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera     | 600 keluarga  |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1      | 1906 keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2      | 1909 keluarga |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3      | 973 keluarga  |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 673 keluarga  |
| 6. Total jumlah kepala keluarga     | 6061 keluarga |

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

| <b>A. SUBSEKTOR PERTANIAN</b> |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Tanaman                       | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
| Padi sawah                    | 390                | 6.5                     | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0                  |
|                               |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

| <b>B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                |  |  |  |  |  |  |  |

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Gengkeh | 0                  | 0                       | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0                  |
|         |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------------|
|                |                |                     |                                    |  |                      |

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

| Jenis Produksi | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                |                            |                     |                                    |  |   |                       |

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN

|  |          |
|--|----------|
| Total nilai produksi tahun ini                       | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan            | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                   | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis  |

F. SUBSEKTOR KERAJINAN

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |
| Total jenis kerajinan rumah tangga        | 0 jenis  |

G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

G.1. Subsektor Industri Pangan

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada  | 0 jenis  |

H. SUBSEKTOR KEHUTANAN

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

I.1. Subsektor Perdagangan Besar

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Total nilai transaksi                 | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar  | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya            | Rp. 0,00 |

I.2. Subsektor Perdagangan Eceran

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Jumlah total jenis perdagangan eceran | 0 jenis  |
| Total nilai transaksi                 | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan eceran   | Rp. 0,00 |

I.3. Subsektor Hotel

|   |          |
|---|----------|
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 0 jenis  |
| Jumlah total pendapatan                                   | Rp. 0,00 |

|  |          |
|--|----------|
| Jumlah total biaya pemeliharaan                                  | Rp. 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                             | Rp. 0,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                           | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>I.4. Subsektor Restoran</b>                                   |          |
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi                                | 0 Unit   |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan                                  | Rp. 0,00 |
| Biaya antara lainnya   | Rp. 0,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                           | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>                             |          |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini                               | 0 unit   |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan                              | Rp. 0,00 |
| Total nilai bangunan yang ada                                    | Rp. 0,00 |
| Biaya antara lainnya   | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>         |          |
| <b>K.1. Subsektor Bank</b>                                       |          |
| Jumlah transaksi perbankan                                       | Rp. 0,00 |
| Jumlah nilai transaksi perbankan                                 | Rp. 0,00 |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan                                    | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>                |          |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank                               | 0 Unit   |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank       | 0 Jenis  |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank                      | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>                              |          |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah                        | 0 unit   |
| Total nilai persewaan yang dicapai                               | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya  | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>                            |          |
| Jumlah perusahaan jasa   | 0 Jenis  |
| Nilai transaksi perusahaan jasa                                  | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya  | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>                                       |          |
| <b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>                     |          |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat       | 0 unit   |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat         | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan                           | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>                                |          |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat    | 0 jenis  |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial                        | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>                  |          |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi                           | 0 jenis  |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi                  | Rp. 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>           |          |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis  |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga            | Rp. 0,00 |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga       | Rp. 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp. 0,00 |
|  |          |
| <b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>                         |          |

|   |                 |
|---|-----------------|
|   |                 |
| <b>M.1. Subsektor Angkutan</b>  |                 |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 0 Jenis         |
| Jumlah total kendaraan angkutan   | 0 Unit          |
| Nilai total transaksi pengangkutan  | Rp 0,00         |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan  | Rp 0,00         |
|   |                 |
| <b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>   |                 |
|   |                 |
| <b>N.1. Subsektor Listrik</b>   |                 |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik  | 0 Jenis         |
| Jumlah nilai produksi listrik   | Rp 0,00         |
| Jumlah total nilai transaksi  | Rp 0,00         |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan  | Rp 0,00         |
|   |                 |
| <b>N.2. Subsektor Gas</b>   |                 |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas  | 0 jenis         |
| Nilai aset produksi gas   | Rp 0,00         |
| Nilai transaksi   | Rp 0,00         |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00         |
|   |                 |
| <b>N.3. Subsektor Air Minum</b>   |                 |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum   | 0 jenis         |
| Nilai aset penyediaan air minum   | Rp 0,00         |
| Nilai produksi air minum  | Rp 0,00         |
| Nilai transaksi air minum   | Rp 0,00         |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00         |
|   |                 |
| <b>IV. PENDAPATAN PERKAPITA</b>   |                 |
| <b>A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha</b>   |                 |
|   |                 |
| <b>A.1. Industri kecil, menengah dan besar</b>  |                 |
| 1. Jumlah rumah tangga  | 20 Keluarga     |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga  | 60 orang        |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani   | 40 Keluarga     |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh  | 40 orang        |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga   | Rp 2.000.000,00 |
|   |                 |
| <b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>  |                 |
| Jumlah Kepala Keluarga  | 5961 KK         |
| Jumlah Anggota Keluarga   | 16461 orang     |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga   | Rp 1.000.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja  | Rp 1.000.000,00 |
|   |                 |
| <b>V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR</b>  |                 |
| <b>1. Sektor Pertanian</b>  |                 |
| Petani  | 0 orang         |
| Buruh Tani  | 75 orang        |
| Pemilik Usaha Tani  | 150 orang       |
|   |                 |
| <b>2. Sektor Perkebunan</b>   |                 |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan  | 0 orang         |
| Buruh perkebunan  | 0 orang         |
| Pemilik usaha Perkebunan  | 0 orang         |
|   |                 |
| <b>3. Sektor Peternakan</b>   |                 |
| Peternakan Perorangan   | 0 orang         |
| Buruh Usaha Peternakan  | 0 orang         |
| Pemilik Usaha Peternakan  | 3 orang         |
|   |                 |
| <b>4. Sektor Perikanan</b>  |                 |

|  |            |
|--|------------|
| Nelayan  | 0 orang    |
| Buruh Usaha Perikanan  | 0 orang    |
| Pemilik Usaha Perikanan                                      | 0 orang    |
|  |            |
| <b>5. Sektor Kehutanan</b>                                   |            |
| Pengumpul Hasil Hutan  | 0 orang    |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan                           | 0 orang    |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan                         | 0 orang    |
|  |            |
| <b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>             |            |
| Penambang Galian C Perorangan                                | 0 orang    |
| Buruh Usaha Pertambangan                                     | 0 orang    |
| Pemilik Usaha Pertambangan                                   | 0 orang    |
|  |            |
| <b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b> |            |
|  |            |
| <b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>                 |            |
| Karyawan perusahaan swasta                                   | 2873 orang |
| Karyawan perusahaan pemerintah                               | 476 orang  |
| Pemilik perusahaan   | 193 orang  |
|  |            |
| <b>9. Sektor Perdagangan</b>                                 |            |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi                              | 0 orang    |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi                                 | 0 orang    |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi                             | 0 orang    |
|  |            |
| <b>10. Sektor Jasa</b>                                       |            |
| Pensiunan TNI/POLRI  | 332 orang  |
| Sopir  | 97 orang   |
| Buruh migran perempuan                                       | 76 orang   |
| Jasa penyewaan peralatan pesta                               | 3 orang    |
|  |            |

## VI. PENGUSAHAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>A. ASET TANAH</b>                                   |                   |
| Tidak memiliki tanah                                   | 500 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha                       | 442 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha                      | 365 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha                      | 175 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha                      | 416 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha                      | 406 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha                      | 394 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha                      | 385 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha                      | 377 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha                      | 364 orang         |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha                     | 0 orang           |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha                      | 0 orang           |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha                        | 0 orang           |
| Jumlah total penduduk                                  | 0 orang           |
|  |                   |
| <b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>                |                   |
| Memiliki ojek  | 70 orang- 70 unit |
|  |                   |
| <b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>                         |                   |
| Memiliki penggilingan padi                             | 4 orang           |
| Memiliki traktor                                       | 6 orang           |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian             | 0 orang           |
| Memiliki kapal penangkap ikan                          | 0 orang           |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan               | 0 orang           |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan              | 0 orang           |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan              | 0 orang           |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan                   | 0 orang           |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang           |
|  |                   |

|  |               |
|--|---------------|
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata   | 0 orang       |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan                            | 0 orang       |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang       |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas                                     | 0 orang       |
| <b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>   |               |
| Tembok   | 1096 rumah    |
| Kayu   | 38 rumah      |
| Bambu  | 19 rumah      |
| Tanah liat   | 0 rumah       |
| <b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>  |               |
| Keramik  | 963 rumah     |
| Semen  | 369 rumah     |
| Kayu   | 11 rumah      |
| Tanah  | 15 rumah      |
| <b>RUMAH MENURUT ATAP</b>  |               |
| Genteng  | 1123 rumah    |
| Seng   | 9 rumah       |
| Asbes  | 16 rumah      |
| Beton  | 3 rumah       |
| Bambu  | 1 rumah       |
| Daun lontar/gebang/enau  | 0 rumah       |
| <b>VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA</b>   |               |
| Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya   | 5961 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil   | 18 Keluarga   |
| Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional  | 11 Keluarga   |
| Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan                                       | 18 Keluarga   |
| <b>VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>   |               |
| <b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>  |               |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin  | 5 orang       |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak                         | 420 orang     |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental  | 8 orang       |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat   | 2160 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat  | 6496 orang    |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat  | 224 orang     |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat   | 223 orang     |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat  | 3054 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat   | 675 orang     |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat  | 320 orang     |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat  | 3554 orang    |
| Jumlah penduduk sedang D-1   | 400 orang     |
| Jumlah penduduk tamat D-1  | 930 orang     |
| Jumlah penduduk sedang D-2   | 375 orang     |
| Jumlah penduduk tamat D-2  | 795 orang     |
| Jumlah penduduk sedang D-3   | 633 orang     |
| Jumlah penduduk tamat D-3  | 111 orang     |
| Jumlah penduduk sedang S-1   | 175 orang     |
| Jumlah penduduk tamat S-1  | 482 orang     |
| Jumlah penduduk sedang S-2   | 0 orang       |
| Jumlah penduduk tamat S-2  | 5 orang       |
| Jumlah penduduk tamat S-3  | 3 orang       |
| Jumlah penduduk sedang SLB A   | 2 orang       |
| Jumlah penduduk tamat SLB A  | 0 orang       |
| Jumlah penduduk sedang SLB B   | 0 orang       |
| Jumlah penduduk tamat SLB B  | 0 orang       |
| Jumlah penduduk sedang SLB C   | 0 orang       |
| Jumlah penduduk tamat SLB C  | 0 orang       |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental   | 8 orang       |
| <b>B. Wajib belajar 9 tahun</b>  |               |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun   | 3058 orang    |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 3058 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 544 orang  |
| <b>C. Rasio Guru dan Murid</b>                        |            |
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak           | 18 orang   |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak          | 420 orang  |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat                       | 60 orang   |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat                      | 2160 orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat                     | 20 orang   |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat                    | 223 orang  |
| 7. Jumlah guru SLTA/sederajat                         | 4 orang    |
| 8. Jumlah siswa SLTA/sederajat                        | 575 orang  |
| 9. Jumlah siswa SLB                                   | 0 orang    |
| 10. Jumlah guru SLB                                   | 0 orang    |
| <b>D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat</b>           |            |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan                    | 1 unit     |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan                    | 0 unit     |
| Jumlah perpustakaan keliling                          | 0 unit     |
| Jumlah sanggar belajar                                | 0 unit     |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah       | 0 kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A                       | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A                          | 0 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket B                       | 0 kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B                          | 0 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket C                       | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C                          | 0 orang    |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan                    | 0 unit     |
| Jumlah peserta kursus keterampilan                    | 0 orang    |

## IX. KESEHATAN MASYARAKAT

|   |          |
|---|----------|
| <b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>  |          |
| Jumlah ibu hamil  | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu  | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas   | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit   | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek  | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek   | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih  | 0 orang  |
| Jumlah kematian ibu hamil   | 0 orang  |
| Jumlah ibu hamil melahirkan   | 20 orang |
| Jumlah ibu nifas  | 0 orang  |
| Jumlah kematian ibu nifas   | 0 orang  |
| Jumlah ibu nifas hidup  | 0 orang  |
| <b>B. Kualitas Bayi</b>   |          |
| Jumlah keguguran kandungan  | 0 orang  |
| Jumlah bayi lahir   | 0 orang  |
| Jumlah bayi lahir mati  | 0 orang  |
| Jumlah bayi lahir hidup   | 20 orang |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan   | 0 orang  |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan  | 0 orang  |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg  | 0 orang  |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang  |
| <b>C. Kualitas Persalinan</b>   |          |
| <b>Tempat Persalinan</b>  |          |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum  | 1 unit   |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin  | 1 unit   |
| Tempat persalinan Puskesmas   | 16 unit  |
| Tempat persalinan Polindes  | 0 unit   |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak  | 0 unit   |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan   | 2 unit   |

|  |                |
|--|----------------|
| Tempat praktek dokter  | 0 unit         |
| Rumah dukun  | 0 unit         |
| Rumah sendiri  | 0 unit         |
|  |                |
| <b>Pertolongan Persalinan</b>  |                |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter  | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong bidan   | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong perawat   | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin                                      | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga  | 0 tindakan     |
|  |                |
| <b>D. Cakupan Imunisasi</b>  |                |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan   | 5 orang        |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1                          | 5 orang        |
| Jumlah bayi usia 3 bulan   | 5 orang        |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2                           | 5 orang        |
| Jumlah bayi usia 4 bulan   | 5 orang        |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3                           | 5 orang        |
| Jumlah bayi 9 bulan  | 5 orang        |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak                                      | 5 orang        |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar   | 20 orang       |
|  |                |
| <b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>                              |                |
| Pasangan Usia Subur  |                |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun   | 0 orang        |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun                                      | 0 orang        |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun                             | 0 orang        |
| Jumlah pasangan usia subur   | 0 pasangan     |
|  |                |
| <b>Keluarga Berencana</b>  |                |
| Jumlah akseptor KB   | 0 orang        |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik  | 209 orang      |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral                                      | 170 orang      |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom  | 80 orang       |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil   | 130 orang      |
| Jumlah pengguna metode vasketomi   | 2 orang        |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi                                   | 0 orang        |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah                                  | 15 orang       |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional                                     | 0 orang        |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx                                    | 0 orang        |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB                                    | 0 orang        |
|  |                |
| <b>F. Wabah Penyakit</b>   |                |
|  |                |
| <b>G. Angka Harapan Hidup</b>  |                |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan                                    | 60,00 Tahun    |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota                                    | 0,00 Tahun     |
| Angka Harapan Hidup Provinsi   | 0,00 Tahun     |
| Angka harapan Hidup Nasional   | 0,00 Tahun     |
|  |                |
| <b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>                               |                |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali                                      | 5 Keluarga     |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM   | 0 Keluarga     |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan                             | 0 Keluarga     |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa                                     | 5.910 Keluarga |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran                              | 0 Keluarga     |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum                                     | 0 Keluarga     |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai                                      | 0 Keluarga     |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung  | 0 Keluarga     |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air                                   | 0 Keluarga     |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut       | 0 Keluarga     |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga     |
| Total jumlah keluarga  | 5.915 Keluarga |
|  |                |
| <b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>                                      |                |



|  |                |
|--|----------------|
| Kebiasaan buang air besar  |                |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat                             | 4.380 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 5 Keluarga     |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan  | 0 Keluarga     |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum                | 20 Keluarga    |

#### Pola makan

|   |       |
|---|-------|
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali        | Tidak |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali            | Ada   |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali            | Ada   |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada   |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali     | Tidak |

#### Kebiasaan berobat bila sakit

|  |           |
|--|-----------|
| Dukun Terlatih   | Sedikit   |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit   |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif        | Sedikit   |
| Paranormal   | Tidak ada |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri                   | Sedikit   |
| Tidak diobati  | Tidak ada |

#### J. Status Gizi Balita

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Jumlah Balita                | 1.399 orang |
| Jumlah Balita bergizi buruk  | 1 orang     |
| Jumlah Balita bergizi baik   | 1.397 orang |
| Jumlah Balita bergizi kurang | 0 orang     |
| Jumlah Balita bergizi lebih  | 0 orang     |

#### K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

| Jenis penyakit | Jumlah penderita | Di rawat di |
|----------------|------------------|-------------|
| Jantung        | 3 orang          | Puskesmas   |

#### L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

|  |               |
|--|---------------|
| Jumlah MCK Umum                                  | 11 unit       |
| Jumlah Posyandu                                  | 13 unit       |
| Jumlah kader Posyandu aktif                      | 43 orang      |
| Jumlah pembina Posyandu                          | 13 orang      |
| Jumlah Dasawisma                                 | 226 Dasawisma |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif                 | 20 orang      |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif          | 3 orang       |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 1 orang       |
| Buku rencana kegiatan Posyandu                   | Diisi         |
| Buku data pengunjung Posyandu                    | Diisi         |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu                 | Diisi         |
| Buku administrasi Posyandu lainnya               | 6 jenis       |
| Jumlah kegiatan Posyandu                         | 5 jenis       |
| Jumlah kader kesehatan lainnya                   | 41 orang      |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis                | 1 jenis       |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN  | 1 jenis       |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan           | 1 jenis       |
| Lainnya  | 0 jenis       |

#### X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

##### A. Konflik SARA

|   |         |
|---|---------|
| Kasus konflik pada tahun ini  | 0 kasus |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW  | 0 kasus |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli  | 0 kasus |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah  | 0 kasus |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah   | 0 orang |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan  | 0 orang |

|   |           |
|---|-----------|
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan   | 0 orang   |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | 0 orang   |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik   | 0 kasus   |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                                    | 0 orang   |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                              | Rp 0,00   |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 buah    |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 rumah   |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara  | 0 orang   |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara   | 0 orang   |
| Jumlah janda akibat konflik Sara  | 0 orang   |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara   | 0 orang   |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| <b>B. Perkelahian</b>   |           |
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini   | 0 kasus   |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa  | 0 kasus   |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah   | 0 kasus   |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material  | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| <b>C. Pencurian</b>   |           |
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini   | 1 kasus   |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat  | 0 kasus   |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat  | 0 kasus   |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api   | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| <b>D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah</b>   |           |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat                            | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| <b>E. Perjudian, Penipuan dan Ponggelapan</b>   |           |
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi   | 0 orang   |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini  | 0 orang   |
| Jumlah kasus penipuan dan atau ponggelapan  | 0 orang   |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang  | 0 orang   |
| <b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>   |           |
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras   | 0 buah    |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras   | 0 orang   |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras   | 0 kasus   |
| Jumlah pengedar Narkoba   | 0 orang   |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba   | 0 orang   |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba   | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang   |
| <b>G. Prostitusi</b>  |           |
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat  | 0 orang   |
| Lokalisasi prostitusi   | Tidak Ada |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)  | 0 buah    |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi   | 0 kasus   |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi  | 0 kali    |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi  | 0 kali    |
| <b>H. Pembunuhan</b>  |           |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini  | 0 orang   |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat  | 0 kasus   |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat   | 0 kasus   |
| Jumlah kasus bunuh diri   | 0 kasus   |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum   | 0 kasus   |

|  |           |
|--|-----------|
|  |           |
| <b>I. Penculikan</b>   |           |
| Jumlah kasus penculikan  | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat                       | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat                                      | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum                                       | 0 kasus   |
|  |           |
| <b>J. Kejahatan seksual</b>  |           |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini  | 0 kasus   |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini   | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara                                    | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat                                      | 0 kasus   |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks                                  | 0 unit    |
|  |           |
| <b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   |           |
| Jumlah gelandangan   | 0 orang   |
| Jumlah pengemis jalanan  | 0 orang   |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar  | 0 orang   |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar   | 0 orang   |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental  | 1 orang   |
| Jumlah orang cacat fisik   | 4 orang   |
| Jumlah orang kelainan kulit  | 0 orang   |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan   | 0 orang   |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh   | 0 unit    |
| Jumlah panti jompo   | 0 unit    |
| Jumlah panti asuhan anak   | 0 unit    |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan  | 0 unit    |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota   | 0 orang   |
| Jumlah penghuni bantaran sungai  | 50 orang  |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api   | 0 orang   |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya                                     | 0 orang   |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif | 0 orang   |
| Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun  | 50 orang  |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun   | 75 orang  |
| Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun   | 125 orang |
| Jumlah janda   | 157 orang |
| Jumlah duda  | 112 orang |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran   | 87 orang  |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat                              | 0 orang   |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat                           | 115 orang |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat                           | 165 orang |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang                                 | 275 orang |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga  | 157 orang |
| Jumlah penduduk eks NAPI   | 3 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir                                       | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi                                | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami                                      | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi                                   | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah                              | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan                                 | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor                                | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan                              | 0 orang   |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan  | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih   | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus                                    | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh                                  | 0 orang   |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk                               | 25 orang  |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman  | 0 orang   |
|  |           |
| <b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>   |           |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri  | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami  | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak   | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua   | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya                     | 0 kasus   |
|  |           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>M. Teror dan Intimidasi</b>  |                   |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk  | 0 kasus           |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat   | 0 kasus           |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal   | 0 kasus           |
| <b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>  |                   |
| Organisasi Siskamling   | Ada               |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat   | Ada               |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda  | 73 RT             |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas  | 20 orang          |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda  | Ada               |
| Buku anggota Hansip dan Linmas  | 1 jenis           |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta   | 0 unit            |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah   | 5 kegiatan        |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan  | 1 Pos             |
| <b>XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT</b>  |                   |
| <b>A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara</b>  |                   |
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara   | 0 jenis           |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara  | 0 kegiatan        |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika  | 0 jenis           |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika   | 0 kegiatan        |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya   | 0 jenis           |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya  | 0 kegiatan        |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri  | 0 kasus           |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi  | 0 orang           |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi   | 0 orang           |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan  | 0 kasus           |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga  | 0 kasus           |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini   | 0 kasus           |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan   | 0 kasus           |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini  | 0 kasus           |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara  | 0 kasus           |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.                     | 0 kasus           |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya  | 0 kasus           |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | 0 kasus           |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain  | 0 kasus           |
| <b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>  |                   |
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan  | 0 jenis           |
| Jumlah Wajib Pajak  | 4261 orang        |
| Target PBB  | Rp 139.946.565,00 |
| Realisasi PBB   | 50,00 %           |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB  | 0 tindakan        |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan   | 1 jenis           |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan   | 2 orang           |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan   | Rp 0,00           |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan  | 0,00 %            |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan  | 0 jenis           |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan  | Rp 0,00           |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan  | 0,00 %            |
| Jumlah kasus pungutan liar  | 0 kasus           |

|  |  |
|--|--|
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar  | 0 kasus  |
| <b>C. Partisipasi Politik</b>  |  |
| <b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>   |  |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih  | 11358 orang  |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu  | 10192 orang  |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik   | 2 orang  |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini  | 5 partai   |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini  | 3 partai   |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan   | 3 orang  |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu   | 0 orang  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil   | 9191 pemilih   |
| <b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>  |  |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih   | 11500 orang  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu  | 10192 pemilih  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu  | 11358 pemilih  |
| <b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>   |  |
| Penentuan Jabatan Kepala Desa  | Dipilih masyarakat secara langsung   |
| Penentuan Sekretaris Desa  | Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota  |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun   | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat   |
| Masa jabatan Kepala Desa   | 6 tahun  |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan   | Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung   |
| <b>4. Pemilihan BPD</b>  |  |
| Jumlah anggota BPD   | 11 orang   |
| Penentuan anggota BPD  | Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat  |
| Pimpinan BPD   | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung  |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD   | Ada  |
| Anggaran untuk BPD   | Ada  |
| Produk keputusan BPD tahun ini   | 1. Peraturan Desa 1 buah<br>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali<br>3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah<br>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali<br>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali<br>6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali<br>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali |
| <b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>  |  |
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan  | Ada  |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD   | Perdes   |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 8 unit organisasi  |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK   |  |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan   | 0 unit organisasi  |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK   | Dipilih oleh rakyat secara langsung  |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  | Dipilih oleh rakyat secara langsung  |

|   |            |
|---|------------|
| Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya   |            |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  | Aktif      |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK   | 0 kegiatan |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK   |            |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK   | 0 kegiatan |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK  | Tidak      |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya                              |            |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK  |            |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD   |            |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK  | 0,00 %     |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK |            |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK   |            |
|   |            |

### C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

|   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan</b>   |              |
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan  | 18 kali      |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan  | 80,00 %      |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan   | 60,00 %      |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan   | 20,00 %      |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan   | 0,00 %       |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif  | Ya           |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan   | Ya           |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif  | Ya           |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan   | 6,00 %       |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa   | 6,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan     | 8,00 %       |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel   | 0 kegiatan   |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)   | Ada          |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)  | Ada          |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada          |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi  | 0 . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang  | 0 . kegiatan |
|   |              |
| <b>2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan</b>   |              |
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang   | 50,00 %      |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota  | 100,00 %     |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa  | 9 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah   | 0 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang   | 0,00 %       |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan   | 6,00 %       |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan  | 6,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat   | 4,00 %       |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada  | Ada          |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.   | Tidak        |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah   | 0 kasus      |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan   | 0 kasus      |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum  | 0 kasus      |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan   | 0 Jenis      |

|   |            |
|---|------------|
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan  | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota   | 8 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi   | 1 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN   | 3 kegiatan |
| <b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>  |            |
| Jumlah kelompok arisan  | 10 buah    |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh  | 100 orang  |
| Ada tidaknya dana sehat   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah  | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana                                    | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha  | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya  | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi  | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya   | Ada        |
| <b>4. Adat Istiadat</b>   |            |
| Adat istiadat dalam perkawinan  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam upacara kematian  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan   | Tidak      |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian   | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai   | Tidak      |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga  | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam   | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya  | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar   | Pernah Ada |
| <b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>   |            |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan   | 0 jenis    |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar   | 0 jenis    |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah  | 0          |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah   | 0          |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal   | 0          |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga   | 0 jenis    |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga   | 0 jenis    |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga   | 0 jenis    |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.  | 0 kasus    |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya  | 0 kasus    |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus    |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus    |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan | 0          |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan   | 1          |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat  | 0          |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri   | 0          |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain  | 0          |
| <b>Etos Kerja Penduduk</b>  |            |
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas   | 0          |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi  | 0          |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan  | 0          |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan   | 0          |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain   | 0          |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain   | 0          |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota   | 1          |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya  | 1          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak  | 2                   |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan                     | 0                   |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen                                  | 0                   |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu   | 0                   |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah   | 0                   |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan  | 1                   |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan  | 1                   |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya  | 0                   |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat              | 1                   |
|  |                     |
| <b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>   |                     |
| <b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>  |                     |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK   | Tidak               |
| Jumlah kegiatan  | Jenis               |
|  |                     |
| <b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>  |                     |
| <b>1. Posyandu</b>   | <b>Ada</b>          |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif       |
| Buku Administrasi  | 0                   |
| Jumlah kegiatan  | 0 Jenis             |
|  |                     |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa  |                     |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan   |                     |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan   |                     |
|  |                     |
| <b>XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>   |                     |
| <b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>  |                     |
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini  | Rp 2.682.243.700,00 |
| Sumber Anggaran  |                     |
| APBD Kabupaten/Kota  | Rp 198.519.900,00   |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Rp 63.168.500,00    |
| Bantuan Pemerintah Provinsi  | Rp 130.000.000,00   |
| Bantuan Pemerintah Pusat   | Rp 1.301.195.000,00 |
| Pendapatan Asli Desa   | Rp 7.200.000,00     |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Rp 1.200.000,00     |
| Alokasi Dana Desa  | Rp 980.960.300,00   |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan   | Rp 0,00             |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat  | Rp 0,00             |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan  | Rp 2.126.578.151,00 |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai  | Rp 555.665.549,00   |
|  |                     |
| <b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>   |                     |
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD   | 1                   |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 3 jenis             |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa   | 1                   |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota  | 1                   |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat   | 2 jenis             |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah                   | 0 kasus             |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah                         | 0 kasus             |
|  |                     |
| <b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>   |                     |
| <b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>  |                     |
| Gedung Kantor  | Ada - Baik          |
| Jumlah ruang kerja   | 7 Ruang             |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya  | Ada                 |
| Listrik  | Ada                 |
| Air bersih   | Ada                 |
|  |                     |



|   |                      |
|---|----------------------|
| Telepon   | Ada                  |
| <b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>                  |                      |
| Jumlah mesin tik  | 2 buah               |
| Jumlah meja   | 12 buah              |
| Jumlah kursi  | 12 buah              |
| Jumlah almari arsip   | 4 buah               |
| Komputer  | 8 unit               |
| Mesin fax   | 0 unit               |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa                             | 2 unit               |
| <b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>         |                      |
| Buku Data Peraturan Desa                                      | Ada dan Terisi       |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah                              | Ada dan Terisi       |
| Buku Administrasi Kependudukan                                | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Inventaris  | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Aparat  | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Tanah Kas Desa                                      | Tidak Ada            |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi                         | Ada dan Tidak Terisi |
| Buku Data Tanah   | Ada dan Terisi       |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat                             | Tidak Ada            |
| Buku Agenda Ekspedisi   | Ada dan Terisi       |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan                                | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Induk Penduduk                                      | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Mutasi Penduduk                                     | Ada dan Terisi       |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan                        | Ada dan Terisi       |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk                            | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Penduduk Sementara                                  | Ada dan Terisi       |
| Buku Anggaran Penerimaan                                      | Tidak Ada            |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan                 | Tidak Ada            |
| Buku Kas Umum   | Ada dan Terisi       |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan                                  | Ada dan Terisi       |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan               | Ada dan Terisi       |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan                              | Ada dan Terisi       |
| <b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b> |                      |
| Gedung Kantor   | 1                    |
| Jumlah ruang kerja  | 1 Ruang              |
| Balai BPD   | 1 - 1                |
| Listrik   | 1                    |
| Air bersih  | 2                    |
| Telepon   | 0                    |
| <b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>                  |                      |
| Jumlah mesin tik  | 0 buah               |
| Jumlah meja   | 2 buah               |
| Jumlah kursi  | 2 buah               |
| Jumlah almari arsip   | 1 buah               |
| Komputer  | 1 unit               |
| Mesin fax   | 0 unit               |
| <b>2.B. Administrasi BPD</b>                                  |                      |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD                           | 1                    |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan                            | 8                    |
| Buku kegiatan BPD   | 1                    |
| Buku himpunan peraturan desa                                  | 1                    |
| Buku Lainnya  | 0                    |
| <b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>  |                      |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan                            | 1                    |
| Alat tulis kantor   | 0                    |
| Barang inventaris   | 0 Jenis              |
| Buku administrasi   | 0 Jenis              |
| Jenis kegiatan  | 0 Jenis              |
| Jumlah pengurus   | 0 Orang              |
| Jumlah ruang kerja  | Ruang                |

#### D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

|   |            |
|---|------------|
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan   | Ada        |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan  | Ada        |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah   | Ada        |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD   | Ada        |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing  | Ada        |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan  | 0 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan   | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan   | 0 kali     |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 kali     |

##### 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

|  |            |
|--|------------|
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan   | 0          |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi   | 1          |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 1          |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah  | 0          |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi   | 0 kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing   | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan                            | 0 jenis    |

##### 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

|  |         |
|--|---------|
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa  | 1 jenis |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa   | 1 jenis |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa   | 1 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.  | 1 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan  | 1 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa   | 1 jenis |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah  | 1 jenis |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota   | 1 jenis |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan   | 0 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan   | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan   | 0 jenis |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD                                    | 0 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan  | 1 jenis |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan   | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan                    | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing   | 0 kasus |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan   | 1 kasus |

|   |        |
|---|--------|
| usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah   |        |
| <b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>  |        |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  | 1 kali |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan  | 1 kali |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan   | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa   | 1 kali |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan  | 1 kali |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan   | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan  | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum   | 1 kali |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan  | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  | 1 kali |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga  | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 1 kali |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan   | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya  | 0 kali |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.  | 0 kali |
|   |        |

KABUPATEN BANDUNG, 15 Januari 2021  
NANJUNG  
Kecamatan MARGAASIH  
Kabupaten KABUPATEN BANDUNG

DIAN IRAWAN,SE  
Kepala Desa

Tembusan :  
1. Camat MARGAASIH  
2. Bupati KABUPATEN BANDUNG  
3. Arsip